

DAFTAR PUSTAKA

- Anauskah, D. (2018). Penerapan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Final atas Jasa Konstruksi E-SPT Masa 2017. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(1).
- Anggiani, R., Utami, E. U., & Aryanto. (2021). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV. Kraton Tegal. *Doctoral dissertation Politeknik Harapan Bersama*.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Badan Pusat Statistika. (2021, Desember 2021). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2021*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Bastable, C. F. (1903). Public finance. Macmillan and Company, limited.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fadli, N., & Zulfayani, A. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Kabupaten Soppeng Dalam Penyetoran Pajak. *AkMen*, 18(3), 245-255.
- Ferdian, T. (2020, Januari 29). *5 titik kritis kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah*. Diambil kembali dari <https://pajak.go.id/>: <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/5-titik-kritis-kepatuhan-pajak-bendaharawan-pemerintah>

- Hidayat, Y. F. (2018). Tata Cara Pelaksanaan Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Perencanaan Konstruksi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
- Ilyassa, E. D. (2021). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Usaha Jasa Konstruksi Terhadap PT Rinron Berkah Abadi Tahun Pajak 2020. (*Unpublished doctoral dissertation*). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Kementerian Keuangan. (2021, September 27). *Menkeu tekankan pentingnya pembangunan infrastruktur*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-tekankan-pentingnya-pembangunan-infrastruktur/>
- Kementerian Keuangan. (2021, Januari 18). *Pembangunan infrastruktur menjadi kunci pembangunan inklusif berkelanjutan*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembangunan-infrastruktur-menjadi-kunci-pembangunan-inklusif-berkelanjutan/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pembangunan infrastruktur menjadi kunci pembangunan inklusif berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kondoy, V. C., Nangoi, G. B., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada CV Cakrawala. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16, 169-180.

- Masdi, A. (2021, Juni 2). *Menakar penerimaan pajak di tahun pandemi*. Diambil kembali dari Kemenkeu: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menakar-penerimaan-pajak-di-tahun-pandemi/>
- Muhlisidina, A. (2018). *Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Jasa Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan PER-22/PJ/2021*. (2020). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah*. (2019). Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. (2009). Jakarta: Sekretariat Negara.

Pertiwi, E. S., Lestari, T., & Rahman, A. (2020). Implementasi Pemotongan Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Berdasar PP 40 Tahun 2009 pada CV. Utama Teknik di Sidoarjo. *UAJ: UBHARA Accounting Journal*, 1(2), 349-356.

Ratuela, H. S., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Realita Timur Perkasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 856-866.

Riftiasari, D. (2018). Analisis Pemungutan Dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final Dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementerian. *Moneter*, 5(2), 39-44.

Sarjono, B. (2017). Analisis Aspek Perpajakan atas Usaha Jasa Konstruksi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 1(02), 55-68.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua)*. Penerbit Alfabeta.

Tim Kementerian Keuangan. (2021). *Informasi APBN 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tumbel, A., Karamoy, H., & Tirayoh, V. (2017). Evaluasi Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak oleh Bendaharwan Pemerintah pada Badan

Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan.

Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 553-564.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara.

Watung, L. R. (2016). Analisis Penerapan Pajak Dengan Withholding Tax System Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Pada PT. Bank Sulutgo Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 4(1), 916-923.